

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap alokasi belanja modal. PAD diukur dengan indikator retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, DAU diukur dengan indikator dana tranfer umum, DAK diukur dengan indikator dana tranfer khusus dan belanja modal diukur dengan indikator belanja modal.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di pulau Jawa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dan analisis data stastik menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*.

Berdasarkan hasil pengujian analisis stastik dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh PAD terhadap belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan indikator pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Hasil pengujian hepotesi kedua yang menguji pengaruh DAU terhadap alokasi belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa DAU idak

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan indikator dana perimbangan umum.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian terdahulu. Namun demikian peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan yang dimaksud meliputi:

1. hanya menggunakan populasi di pulau Jawa, tidak mencakup seluruh kabupaten/kota yang berada di Indonesia.
2. Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang diambil dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, tidak berdasarkan observasi sehingga kurang dapat digali lebih dalam tentang pengalokasian anggaran dalam pemerintahan daerah.

5.3 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan yang diambil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran penelitian antara lain:

1. untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan populasi dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya menggunakan observasi agar dapat dijelaskan secara kualitatif hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal di suatu daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2010. Manajemen Kas Daerah. Diakses dari <http://syukriy.word-press.com> pada tanggal 9 Juli 2012.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* (Vol. 2 No. 2 November 2006) Halaman 17-32.
- Abdul, Halim dan Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten Kota di Jawadan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- Abdul, Halim, 2001, Anggaran Daerah dan "fiscal Stress" (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16(4), 346-357.
- _____, 2002, *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- _____, 2004, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda : Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- _____, 2007, *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX di Padang*.
- Agus, Samekto. 2011. Dampak Desentralisasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). Disertasi, Universitas Brawijaya Malang.
- Andirfa, mulia. 2009. penelitiannya pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal studi kasus pada kota pemerintah aceh. Universitas Syah Kuala Banda Aceh.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFU-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Universitas Gadjah Mada.

Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta : Indeks.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Jurnal disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Hariato, David dan Priyo Hari Adi. 2010. "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". Jurnal yang disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kawedar Warsito, dkk . 2008. "Akuntansi Sektor Publik". Semarang : Undip

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat*. Yogyakarta: Andi.

Muis, Noni Hilwa. 2012. "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara". Tesis. Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Parsiyo dan Widya Iswara Madya. 2013. *Indikator Keberhasilan Pembangunan*. PPMKP Bogor, Jawa Barat.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)". JAAI Vol. 8 No. 2, Hal.101-118.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, *tentang Dana Perimbangan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, *tentang Pengeolaan Keuangan Daerah*.

Poesoro, Adri, 2008, Mekanisme Penetapan Alokasi DAK, Lembaga Penelitian, SMERU, <http://www.smeru.or.id>

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-undang RI Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Jakarta.

